

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdulkadir Muhammad. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Amin Suprihatini. 2009. *Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*. Klaten: Cempaka Putih.
- Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah: kajian teori, hukum, dan aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Fokus Media
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ni'matul Huda. 2012. *"Hukum Tata Negara Indonesia"*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rulam ahmadi. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Sarman dan Mohammad Taufik. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta

Sekolah Managemen BUMDEs (SMB). 2018. *Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta: Syncore Building

Sugiyono. 2014 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitati, dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.

Yayuk Yuliati dan Mangku Purnomo. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Muhammad Algar. 2018. *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum*.

JURNAL:

Edy Yusuf Agunggunanto, dkk. *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis. Vol. 13 No. 1 Juli 2016.

P. L. Rika Fatimah. *Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q-BUMDes) Untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Adaptif: Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa Dengan Menggunakan Model Tetrpreneur*. Jurnal Studi Pemuda. Vol. 7, No. 2 Tahun 2018.

Robiatul Adawiyah. *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol. 6. No. 3 September-Desember 2018.

REFRENSI ASING

A. Chandra Sekhara Reddy dan C. Anbalagan, *Effective Rural Development Strategies For The Improvement Of Indian Economy*, Engineering Science and Technology: An Internasional Journal. Vol. 1, No. 1 Desember 2011.

PERATURAN:

Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kecapi Bumi Mas Desa Kecapi.

Keputusan Petinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Penggantian Dan Perubahan Susunan Pengurus Dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kecapi Bumi Mas Desa Kecapi

Keputusan Petinggi Mangunan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Susunan Pengurus Dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur Sejati Desa Mangunan.

Peraturan Desa Kecapi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kecapi Bumi Mas Desa Kecapi

Peraturan Desa Mangunan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur Sejati

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan tatacara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 23 tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

